

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I - Pelita IV, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta 1990).

A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan Pemahaman)*, disampaikan dalam Pidato pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 25 April 1992.

Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, BinaAksara, Jakarta, 1987.

[Ateng Syafrudin](#), *DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai Badan Legislatif Daerah dari Masa ke Masa*, MandarMaju, Bandung, 2002.

Ateng Syafrudin, *Hubungan Kepala Daerah Dengan DPRD*, Tarsito, Bandung, 2003.

B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

[B. N. Marbun](#), *DPRD: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.

Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Bastian Tafal, *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2007.

Djauhari, *"Konsem Negara Kesejahteraan Pra kemerdekaan RI"*, Semarang, 2006.

George Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Hassan Suryono, *Kenegaraan Perundang-Undangan: Perspektif Sosiologis Normatif dalam Teori dan Praktek*, UNS Press, Surakarta, 2005.

Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD, *Jurnal Innovation* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, 2002.

- Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, BinaAksara, Jakarta, 1999.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenanganantara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cet. 5, Kanisius, Jakarta, 2002.
- Martha Pighome, "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945" dalam jurnal *Dinamika Hukum* Vol.11 No.2, Mei 2011
- Moh. Rifai, *Terjemah / Tafsir Al-Quranul Karim*, Wicaksana, Semarang, 1993.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Daerah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Novita Dewi Mashithoh, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Perwujudan Ekonomi Rakyat", *Jurnal Law Reform Pembaharuan Hukum*, Oktober 2007.

Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1993.

Progo Nurdjuman, *Penyusunan Perda, Proses dan Permasalahannya*, Makalah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2003.

Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2005.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Siagian, *Filsafat Adminitrasi*, GunungAgung, Jakarta, 1990.

[Sri Hadiati W. K.](#), *Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2004.

Soenobo Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Soekarno, *Dasar-DasarManajemen*, Miswar, Jakarta, 1986.

Sofyan Syafri Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Managemen Control System)*, PT. Pustaka Quantum, Jakarta, 2002.

Sofyan S Harahap, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2004.

Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Alumni, Bandung, 1983.

Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Victor Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Wirancarita, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Zulfirman, "Ontologi Demokrasi", *Jurnal Hukum* 14 (2) Juni 2006, Universitas Sultan Agung (UNISULA). Semarang.

PeraturanPerundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 (sesudah Perubahan), Pasal 18.

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 5 Tahun 1974, Pasal 38.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 dan penjelasannya, UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004

Pasal 37 danPasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

Data elektronik:

<http://www.unisosdem.org/otonomi/oto-tapmprXV.htm>

<http://jogja.tribunnews.com/dishubkominfo-sleman-temukan-banyak-pelanggaran-kir>

<http://rechtboy.wordpress.com/2008/03/25/pembentukan-peraturan-desa>